

Katalog BPS : 3205008.3317

ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN REMBANG 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG**

ANALISIS KEMISKINAN

KABUPATEN REMBANG 2014



ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN REMBANG 2014

Nomor Publikasi : 33172.1519
Katalog BPS : 3205008.3317
Ukuran Buku : A4 (8,27 inch x 11,69 inch)
Jumlah Halaman : vi + 33 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

Pengarah : Muh. Saichudin, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab : Muh. Saichudin, S.Si, M.Si

Penyunting : Khaerul Anwar, S.S.T

Penulis : Faisal Luthfi Arief, S.S.T

Gambar Kulit :

Faisal Luthfi Arief, S.S.T

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

ABSTRAK

Pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial, termasuk kemiskinan. Indeks Gini Ratio Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sebesar 0,33, yang berarti ketimpangan pendapatan rendah. Sedangkan berdasarkan kriteria Bank Dunia, pendapatan 40 persen penduduk berpenghasilan rendah sebesar 20,87 persen, menunjukkan tingkat pendapatan antar golongan penduduk cukup merata. Distribusi pendapatan pada tahun 2014 sedikit lebih buruk dibandingkan tahun 2013.

Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan meningkat dari 554.973 rupiah pada tahun 2013 menjadi 616.826 rupiah pada tahun 2014. Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan untuk bahan makanan menurun dari 55,05 persen pada tahun 2013 menjadi 53,44 persen pada tahun 2014.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sebanyak 119,99 ribu orang (19,50 persen), menurun bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 128,0 ribu orang (20,97 persen). Persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada tahun 2014 berada di peringkat 5 (lima) tertinggi se-Propinsi Jawa Tengah. Di wilayah eks Karesidenan Pati, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang tertinggi di antara 5 (lima) kabupaten yang ada.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang pada periode 2010-2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 299.503,- per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2013 (Rp. 284.160,-).

Pada periode tahun 2013-2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 3,40 menjadi 2,99, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang semakin mendekati Garis Kemiskinan. Pada periode yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,88 menjadi 0,76, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2014 menyempit dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tahun 2011-2014 terus menurun meskipun terjadi kenaikan harga BBM pada tahun 2013 dan 2014 dan tidak terlalu berpengaruh pada kelompok penduduk yang berpendapatan menengah ke atas. Hal tersebut terlihat dari nilai *Gini Ratio* dan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia.

Sedangkan pada kelompok penduduk berpenghasilan rendah, kenaikan harga BBM tersebut cukup berpengaruh, terutama pada tahun 2013. Hal demikian terlihat pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia. Persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat Propinsi Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Rembang. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan kemiskinan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 yang merupakan kelanjutan publikasi sebelumnya.

Publikasi ini berisi tentang data dan informasi mengenai kemiskinan dan indikator serta variabel lain yang terkait dengan masalah kemiskinan di Kabupaten Rembang. Data yang disajikan merupakan hasil penghitungan Susenas Tahun 2014. Agar dapat diamati perkembangannya, ditampilkan pula beberapa data dari Susenas tahun-tahun sebelumnya.

Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan sebagian kebutuhan data, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan dapat terpenuhi. Semoga publikasi ini bermanfaat, terutama bagi pengambil kebijakan dan semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini diterbitkan diucapkan terimakasih.

Rembang, Desember 2015

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG
KEPALA,



MUH. SAICHUDIN, S.Si, M.Si

NIP. 19710907 199211 1 001

DAFTAR ISI

Abstrak	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	1
1.3. Sumber Data	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	3
2.1. Teori <i>Gini Ratio</i>	3
2.2. Kriteria Bank Dunia	6
2.3. Pengeluaran	7
2.4. Pendapatan	7
2.5. Definisi Kemiskinan	7
2.5.1. Kemiskinan Relatif	8
2.5.2. Kemiskinan Absolut	8
2.6. Terminologi Kemiskinan	9
2.6.1. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran	11
2.6.2. Rata-Rata per Kapita	12
2.7. Pendekatan BKKBN	13
2.8. Pendekatan Kriteria Penduduk Miskin BPS	14
2.9. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS2011)	16
BAB III. METODOLOGI	18
3.1. Metode Penghitungan	18
3.2. Indikator Kemiskinan	18

BAB IV. DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN REMBANG	20
4.1. <i>Gini Ratio</i>	20
4.2. Kriteria Bank Dunia	21
4.3. Rata-rata Pengeluaran Penduduk Per Kapita	22
4.4. Distribusi Pengeluaran	23
BAB V. KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG	25
5.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang	25
5.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang	28
5.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang	29
BAB VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP	31
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan	13
-----------	--	----

<https://rembangkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	<i>Gini Ratio</i> Kabupaten Rembang, 2010-2014	20
Gambar 4.2	Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Rembang, 2010-2014	21
Gambar 4.3	Rata-rata Pengeluaran Penduduk Per Kapita Sebulan di Kabupaten Rembang, 2010-2014	22
Gambar 4.4	Distribusi Persentase Pengeluaran Penduduk Menurut Penggunaan di Kabupaten Rembang, 2010-2014	23
Gambar 5.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang, 2010-2014.....	25
Gambar 5.2	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang, 2010-2014.....	26
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2014.....	27
Gambar 5.4	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2010-2014.....	28
Gambar 5.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Rembang, 2010-2014	30

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2007-2014.....	35
Tabel 2.	Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Nilai Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Rembang, 2010-2014.....	36
Tabel 3.	Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Rembang, 2010-2014	37
Tabel 4.	Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Keperluan Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Rembang, 2013	38
Tabel 5.	Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Keperluan Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Rembang, 2014	39
Tabel 6.	Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Makanan/Non Makanan di Kabupaten Rembang, 2013	40
Tabel 7.	Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Makanan/Non Makanan di Kabupaten Rembang, 2014	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah ini telah ada sejak dahulu kala, melainkan pula karena masalah ini masih hadir hingga kini serta gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang terjadi akhir-akhir ini. Kemiskinan menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Rembang selain pengangguran. Oleh karena itu informasi tentang kemiskinan sangat penting bagi kelancaran evaluasi dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, perumahan, sandang, pekerjaan, dan sebagainya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat pula digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini antara lain untuk :

- a. Memberi gambaran tentang ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk
- b. Memberi gambaran tentang jumlah dan persentase penduduk miskin

Dalam penulisan ini disajikan juga series data, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Dengan tersedianya series data tersebut, perencana dan pengambil

kebijakan program pembangunan di Kabupaten Rembang dapat menyusun program penanggulangan kemiskinan lebih baik.

1.3. Sumber Data

Sumber data berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2014. Untuk mendukung penulisan dalam publikasi ini disertakan juga hasil SUSENAS tahun-tahun sebelumnya. Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden.

1.4. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dalam 6 (enam) bab, yaitu :

- Bab I. Pendahuluan,** berisi latar belakang penulisan, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab II. Kajian Pustaka,** menjelaskan tentang kajian literatur/pustaka sebagai khasanah ilmu pengetahuan sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan.
- Bab III. Konsep dan Metodologi,** menjelaskan tentang metode penghitungan serta indikator kemiskinan yang mencakup tentang persentase penduduk miskin, ukuran kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan serta konsep dari beberapa istilah berbagai sektor.
- Bab IV. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan,** menjelaskan tentang ukuran distribusi pendapatan antar golongan pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia.
- Bab V. Kemiskinan,** membahas tentang perkembangan kemiskinan, garis kemiskinan, ukuran indeks kemiskinan, gini ratio dan kriteria Bank Dunia di Kabupaten Rembang.
- Bab VI. Kesimpulan dan Penutup,** berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan penutup.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori *Gini Ratio*

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

dengan :

- G = *Gini Ratio*
- P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i
- Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i
- Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i-1
- K = Banyaknya kelas pendapatan

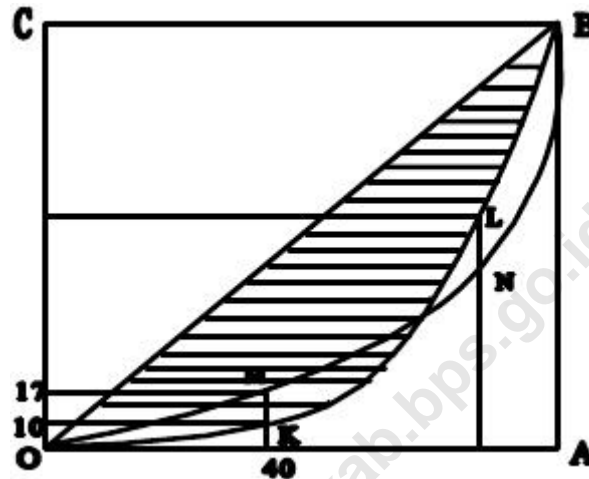
Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- a. Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,35$
- b. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0,35 - 0,5$
- c. Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

Nilai Indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan

pendapatan versi Bank Dunia maupun Indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.

Gambar 1. Kurva Lorenz



Keterangan :

- Sumbu OA menyatakan persentase jumlah penduduk.
- Sumbu OC menyatakan persentase pendapatan.

Titik K pada kurva OKLB menunjukkan 40 persen jumlah penduduk menerima pendapatan sebesar 10 persen total pendapatan. Sedang titik M pada kurva OMNB menggambarkan bahwa 40 persen jumlah penduduk menerima bagian pendapatan sebesar 17 persen dari total pendapatan. Berarti distribusi pendapatan yang digambarkan oleh kurva OMNB lebih merata dari pada distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh kurva OKLB.

Kelemahan *Gini Ratio* adalah besarnya nilai *Gini Ratio* tidak bisa menjelaskan letak ketimpangannya. Penjelasan ini dapat diilustrasikan dengan membuat kurva OMNB yang nilai *Gini Ratio*-nya dibuat sama dengan kurva OKLB. Dalam kurva (yang diarsir) golongan bawah lebih menderita dibandingkan kurva OMNB karena persentase yang diterima oleh 40 persen penduduk hanya 10 persen pendapatan, sedang pada kurva OKLB 40 persen penduduk menerima bagian 17 persen dari total pendapatan. Untuk mengatasi kelemahan ini para pakar menganjurkan agar ukuran ini dilengkapi

dengan ukuran lain seperti Kriteria Bank Dunia, sehingga diketahui keadaan penduduk kelas bawah atau kelas atas yang timpang.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) dalam Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009 (BPS, 2009) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- a. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- b. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- a. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- b. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jikapenduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- c. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- d. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- a. Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total Koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai Indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).

b. Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal inisebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

2.2. Kriteria Bank Dunia

Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan, yaitu 40 persen kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40 persen kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen kelompok berpendapatan tinggi. Pengelompokan seperti ini pada dasarnya sama dengan menggunakan cara desil (*decile*), yaitu 40 persen pertama sama dengan desil ke-4; 40 persen kedua sama dengan desil ke-8 dan 20 persen terakhir adalah desil ke-10.

Dalam menentukan besarnya desil ke-i digunakan rumus :

$$D_i = Q_b + \frac{(n_i - P_i)}{(P_a - P_b)}(Q_a - Q_b)$$

dengan :

i = 1,2,3,4,.....10

n_i = Persentase ke-i

D_i = Desil ke-i

Q_b = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sebelum D_i

Q_a = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sesudah D_i

P_b = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sebelum D_i

P_a = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sesudah D_i

Kriteria ketimpangan diukur berdasarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok berpendapatan rendah. Jika bagian pendapatan yang diterima kelompok ini :

- a. **Kurang dari 12 persen**, maka dapat diartikan bahwa tingkat pemerataan penduduk dalam kategori pemerataan rendah/ketimpangan tinggi,

- b. **12 persen - 17 persen**, maka dapat diartikan bahwa tingkat pemerataan penduduk dalam kategori pemerataan/ketimpangan sedang,
- c. **Di atas 17 persen**, maka dapat diartikan bahwa tingkat pemerataan penduduk dalam kategori pemerataan tinggi/ketimpangan rendah.

2.3. Pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok yaitu konsumsi makanan dan bukan/non makanan (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan keperluan untuk pesta dan upacara). Konsumsi tersebut tanpa memperhatikan asal barang (membeli atau hasil sendiri atau pemberian) dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau diberikan kepada pihak lain.

2.4. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Namun disadari, bahwa informasi pendapatan ini tidak seperti yang diharapkan, dimana banyak responden cenderung memberikan informasi pendapatan yang tidak sebenarnya. Oleh sebab itu, data pendapatan sendiri diperkirakan dari data pengeluaran dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka.

2.5. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a). Terpenuhinya kebutuhan pangan, (b). kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c). rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan, (d). hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

2.5.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 40 persen dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “sepanjang masih ada kehidupan, orang miskin akan selalu hadir bersama kita”.

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh *Ravallion* (1998 : 26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan tetapi dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.5.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum dari kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis

kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut adalah “tetap/tidak berubah” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). *Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya dan jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut.* Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US \$ 1 per hari, dengan batasan ini diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 per hari yang diperkirakan lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

2.6. Terminologi Kemiskinan

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab

tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Hal tersebut menyebabkan mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, Suku Tengger di Pegunungan Tengger Provinsi Jawa Timur, dan sebagainya.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya Suku Badui di Cibeo Banten Selatan, Suku Dayak di pedalaman Pulau Kalimantan, dan suku Kubu di Provinsi Jambi.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya itu dalam kenyataan akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti misalnya posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang dicapai dan dapat dimanfaatkan olehnya itu akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus

terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

2.6.1. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labor Organisation* (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Demikian pula kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, seperti misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah :

1. Menurut *United Nations* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.

3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

2.6.2. Rata-rata per Kapita

Pendekatan rata-rata per kapita yang diterapkan dalam penghitungan kemiskinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Biasanya pendekatan rata-rata per kapita ini belum mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut golongan umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dalam konsumsi. Bahkan ada juga pengukuran secara internasional dengan menggunakan nilai uang dalam bentuk dolar. Bank dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dolar dalam bentuk satuan PPP per kapita per hari. Sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor dan barang-barang lainnya).

Tabel 2.1 Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan

No.	Penelitian	Kriteria	Garis Kemiskinan		
			Desa (D)	Kota (K)	D+K
1.	Esmara, 1969/1970 *)	Konsumsi beras per kapita per tahun (kg)	-	-	125
2.	Sayogya, 1971 *)	Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg) - Miskin (M) - Miskin Sekali (MS) - Paling Miskin (PM)	320 240 180	480 360 270	- - -
3.	Ginneken, 1969 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2.000 50
4.	Anne Booth, 1969/1970 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein	- -	- -	2.000 40
5.	Gupta, 1973 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun (Rp.)	-	-	24.000
6.	Hasan, 1975 *)	Pendapatan minimum per kapita per tahun (US \$)	125	95	-
7.	BPS	Konsumsi kalori per kapita per hari ditambah konsumsi non makanan	-	-	2.100
8.	Sayogya, 1984 **)	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	6.585	8.240	-
9.	Bank Dunia	Pengeluaran per kapita per hari (PPP)	-	-	1 \$, 2\$
10.	Garis Kemiskinan Internasional, Interim Report, 1976 **)	Pendapatan per kapita per tahun - Nilai US \$, 1970 - US \$ Paritas Daya Beli (PPP)	- 7.746	- 13.731	75 200

Keterangan:

*) Hendra Esmara : Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta: 1986, hlm. 312-316, Tabel 9.2.

***) Kompas, Senin : 9 Mei 1988.

2.7. Pendekatan BKKBN

Salah satu penerapan konsep dan definisi kemiskinan pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Hasil dari pendataan keluarga tersebut adalah pentahapan keluarga sejahtera, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga

Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas. Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, disamping ke lima indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

2.8. Pendekatan Kriteria Rumah Tangga Miskin BPS

Pada tahun 2000 BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (*basic needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Hasil dari SPKPM 2000, didapatkan variable-variabel yang mencirikan sifat-sifat kemiskinan. Variabel tersebut adalah :

1. Luas Lantai Perkapita :
 - $\leq 8 \text{ m}^2$ (skor 1)
 - $> 8 \text{ m}^2$ (skor 0)
2. Jenis Lantai :
 - Tanah (skor 1)
 - Bukan Tanah (skor 0)
3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih :
 - Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)
 - Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)
4. Jenis Jamban/WC :
 - Tidak Ada (skor 1)
 - Bersama/Sendiri (skor 0)
5. Kepemilikan Asset :
 - Tidak Punya Asset (skor 1)
 - Punya Asset (skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan) :
 - ≤ 350.000 (skor 1)
 - > 350.000 (skor 0)
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan) :
 - 80 persen + (skor 1)
 - < 80 persen (skor 0)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) :
 - Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
 - Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan *metode stepwise logistic regression* dan *misklasifikasi* yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan *uji Chi-Square* juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan

demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

2.9. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS2011)

Data kemiskinan yang selama ini dihitung dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia yang hanya dapat disajikan sampai tingkat propinsi/kabupaten. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS2011) dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. Berbeda dengan data kemiskinan makro, penentuan rumah tangga penerima BLT pada PPLS2011 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*non-monetary approach*).

Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai rumah
2. Jenis lantai rumah
3. Jenis dinding rumah
4. Fasilitas tempat buang air besar
5. Sumber air minum
6. Penerangan yang digunakan
7. Bahan bakar yang digunakan
8. Frekuensi makan dalam sehari
9. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
10. Kemampuan membeli pakaian.
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga
13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Kepemilikan aset.

Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumah tangga penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem scoring, yaitu setiap variabel diberi skor yang

diberi bobot dan bobotnya didasarkan kepada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk tiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga penerima BLT dari hasil PSE05 dengan formula :

$$I_{RM} = \sum W_i X_i$$

dengan,

W_i = bobot variabel terpilih, dan $\sum W_i = 1$

X_i = nilai skor variabel terpilih (skor 1 untuk jawaban yang mengindikasikan miskin dan skor 0 untuk jawaban yang mengindikasikan tidak miskin).

I_{RM} = indeks rumah tangga penerima BLT, dengan nilai antara 0 dan 1.

Berdasarkan nilai I_{RM} di atas, selanjutnya semua rumah tangga diurutkan dari nilai I_{RM} terbesar sampai terkecil. Semakin tinggi nilai I_{RM} maka semakin miskin rumah tangga tersebut.

BAB III KONSEP DAN METODOLOGI

3.1. Metode Penghitungan

Untuk mengukur kemiskinan, kita menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, *Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.*

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan, garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

3.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dengan,

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*).

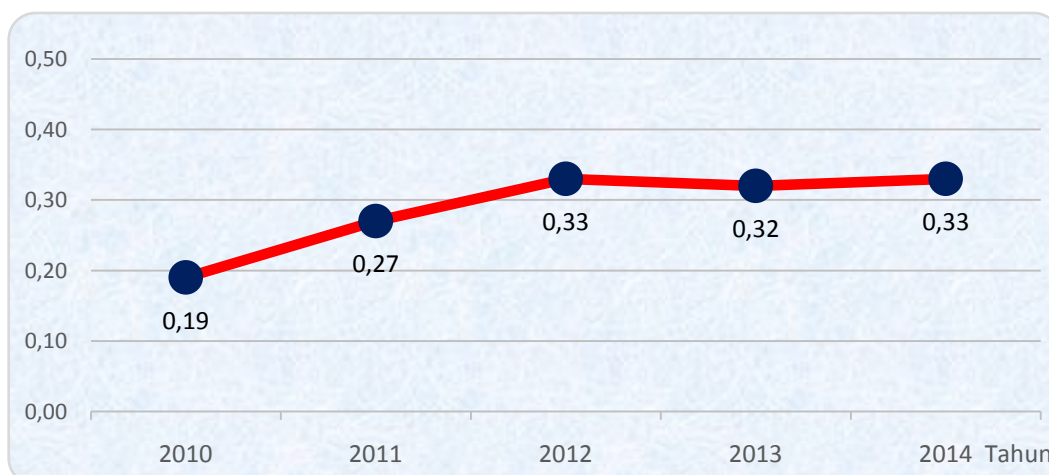
BAB IV DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN REMBANG

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

4.1. Gini Ratio

Nilai Indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Gambar 4.1. Gini Ratio Kabupaten Rembang, 2010–2014



Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

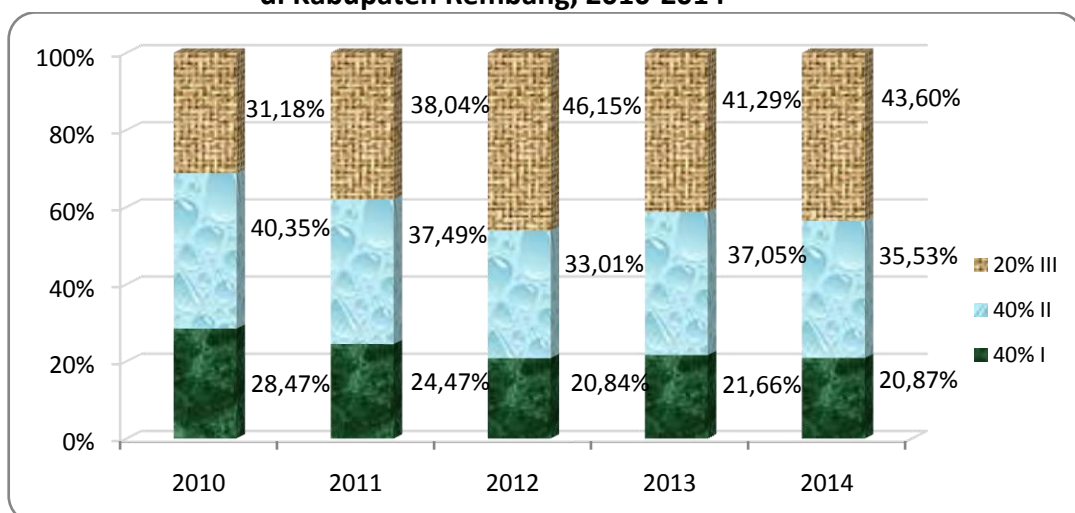
Dari hasil Susenas 2014, *Gini Ratio* di Kabupaten Rembang tercatat sebesar 0,33 yang berarti tingkat ketimpangan rendah. Dibandingkan tahun 2013, *Gini ratio* tahun 2014 sedikit mengalami peningkatan (**Gambar 4.1**). Gambaran ini mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak mempunyai perbedaan yang tajam. Tetapi bila dilihat perkembangannya dari tahun 2010, hal ini cukup mengkhawatirkan, karena perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat semakin melebar dari tahun ke tahun.

Dengan nilai *Gini Ratio* yang semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pemerataan pendapatan Kabupaten Rembang sedikit memburuk dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata.

4.2. Kriteria Bank Dunia

Kelemahan *Gini Ratio* adalah besarnya nilai *Gini Ratio* tidak bisa menjelaskan letak ketimpangannya. Untuk mengatasi kelemahan ini para pakar menganjurkan agar ukuran ini dilengkapi dengan ukuran lain seperti Kriteria Bank Dunia, sehingga diketahui keadaan penduduk kelas bawah atau kelas atas yang timpang.

Gambar 4.2. Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Rembang, 2010-2014

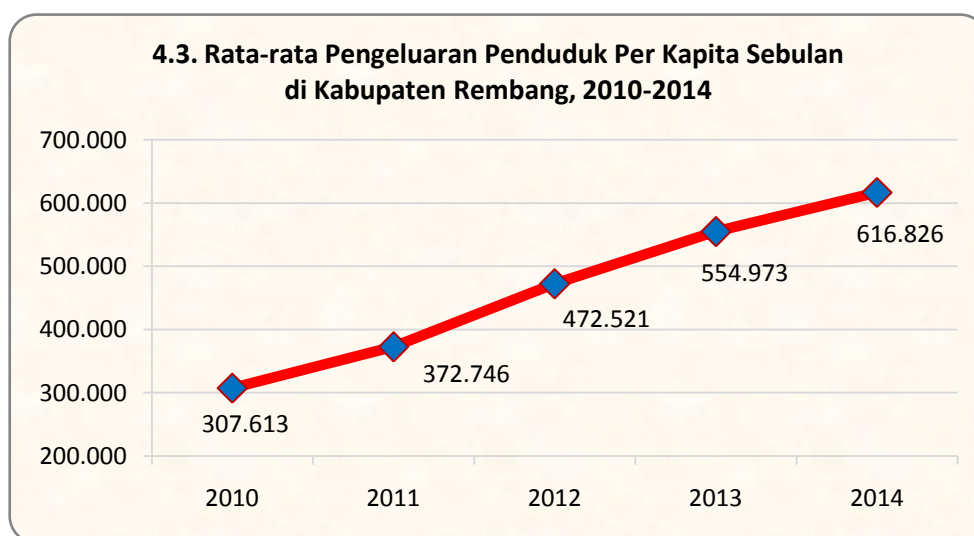


Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

Seperti halnya dengan nilai *Gini Ratio*, tingkat pemerataan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Rembang menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Dari hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Rembang menerima 20,87 persen dari total pendapatan. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 21,66 persen (**Gambar 4.2**). Hal ini berarti bahwa pada tahun 2014 distribusi pendapatan di Kabupaten Rembang ketimpangannya rendah atau memiliki tingkat pemerataan yang cukup tinggi, tetapi masih lebih merata tahun 2013.

4.3. Rata-rata Pengeluaran Penduduk Per Kapita

Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan dapat dijadikan sebagai cermin tingkat pendapatannya per kapita sebulan. Penggunaan data pengeluaran ini disebabkan oleh sulit dan kurang akuratnya data pendapatan. Pada tahun 2010 dan 2011, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan Kabupaten Rembang masing-masing tercatat sebesar 307.613 rupiah dan 372.746 rupiah (**Gambar 4.3**). Bila dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 616.826 rupiah, ada peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya kenaikan harga berbagai jenis kebutuhan pokok penduduk atau karena ada penduduk yang pendapatannya meningkat secara signifikan.



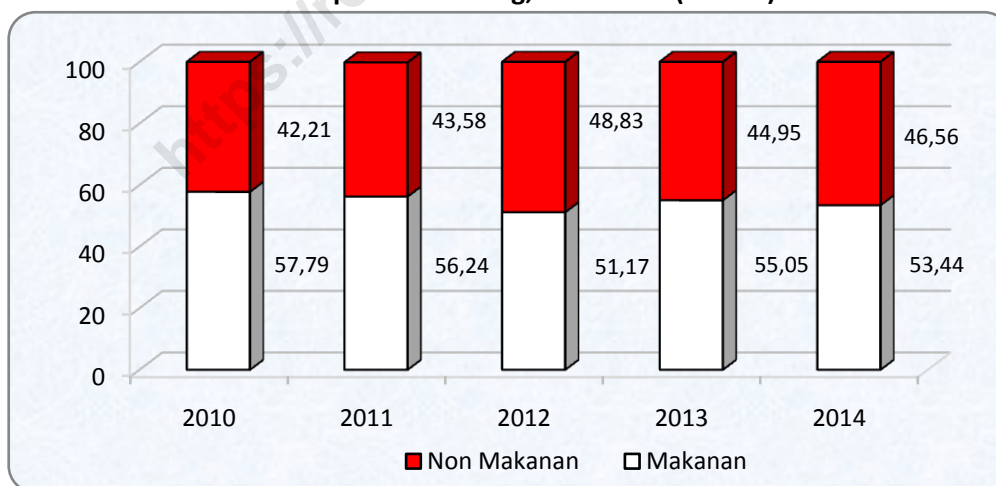
Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

4.4. Distribusi Pengeluaran

Dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar 616.826 rupiah pada tahun 2014, sebanyak 53,44 persen (329.610 rupiah) pengeluaran penduduk di Kabupaten Rembang digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya sebesar 46,56 persen (287.216 rupiah) dikeluarkan untuk kebutuhan non makanan (**Gambar 4.4**).

Distribusi pengeluaran untuk makanan tahun 2014 tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 (55,05 persen), yang disebabkan menurunnya pengeluaran untuk tujuh komoditas makanan yang terdiri dari padi-padian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan serta tembakau dan sirih. Berkurangnya pengeluaran dari tujuh komoditas tersebut sebagian dialihkan penduduk untuk mengkonsumsi kebutuhan pakaian, barang tahan lama dan keperluan pesta. Hal tersebut terutama terjadi pada kelompok penduduk yang berpendapatan Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- (lampiran **Tabel 6-7**).

Gambar 4.4. Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Penggunaan di Kabupaten Rembang, 2010-2014 (Persen)



Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

Meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2014 tidak terlalu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Rembang untuk meningkatkan konsumsi kebutuhan non makanannya. Selain harga bahan makanan yang cukup stabil, dimungkinkan juga karena kenaikan harga BBM terjadi pada pertengahan bulan November 2014, sehingga dampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap pengeluaran

masyarakat sepanjang tahun 2014. Lain halnya dengan kenaikan harga BBM yang terjadi pada bulan Juni 2013, yang disertai dengan kenaikan tarif angkutan umum dan kenaikan tarif dasar listrik, mengakibatkan harga bahan makanan meningkat tajam. Hal tersebut menyebabkan dana yang dikeluarkan penduduk untuk membeli bahan makanan menjadi lebih besar daripada sebelumnya, sehingga pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan non makanan menjadi terbatas, terutama pada penduduk yang berpendapatan rendah.

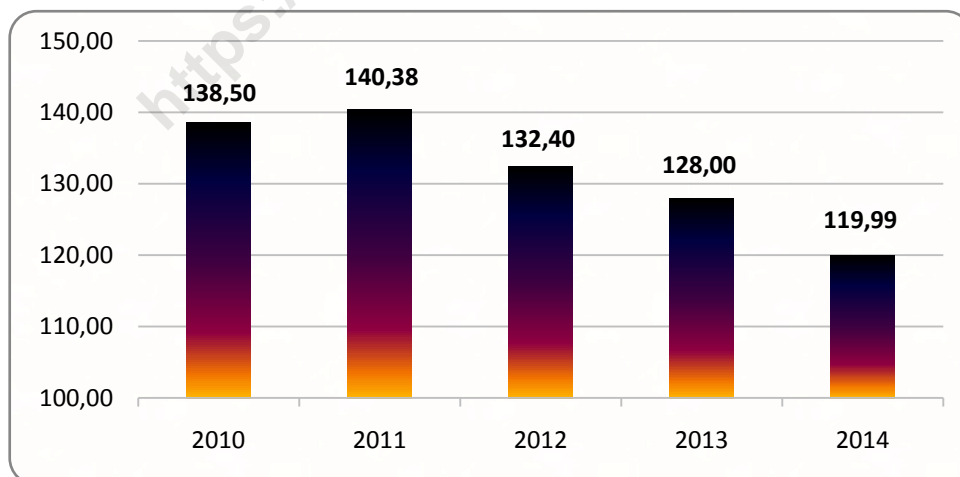
Sebaliknya, bagi penduduk yang mempunyai pendapatan menengah ke atas memiliki persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan semakin rendah dan kebutuhan untuk non makanan semakin tinggi. Dengan pendapatan yang tinggi, mereka lebih leluasa dan tidak terbebani untuk memenuhi kebutuhan non makanan tanpa terpengaruh dengan adanya kenaikan harga-harga. Hal ini dapat dilihat dari distribusi pengeluaran menurut kelompok pendapatan, yang menunjukkan semakin tinggi pendapatan semakin rendah persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan (lampiran **Tabel 7**).

BAB V KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG

5.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada periode tahun 2010-2014 terlihat mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, meskipun sempat meningkat pada tahun 2011. Pada **Gambar 5.1** terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang sebanyak 138,50 ribu jiwa pada tahun 2010, meningkat pada tahun 2011 menjadi 140,38 ribu jiwa. Setelah itu jumlah penduduk miskin selama periode 2012-2014 terus mengalami penurunan hingga menjadi 119,99 ribu jiwa. Kondisi tersebut cukup menggembirakan dan memberikan gambaran bahwa program pengentasan kemiskinan sangat berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, meskipun pada tahun 2013 dan 2014 terjadi kenaikan harga BBM.

Gambar 5.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang, 2010-2014 (000 jiwa)

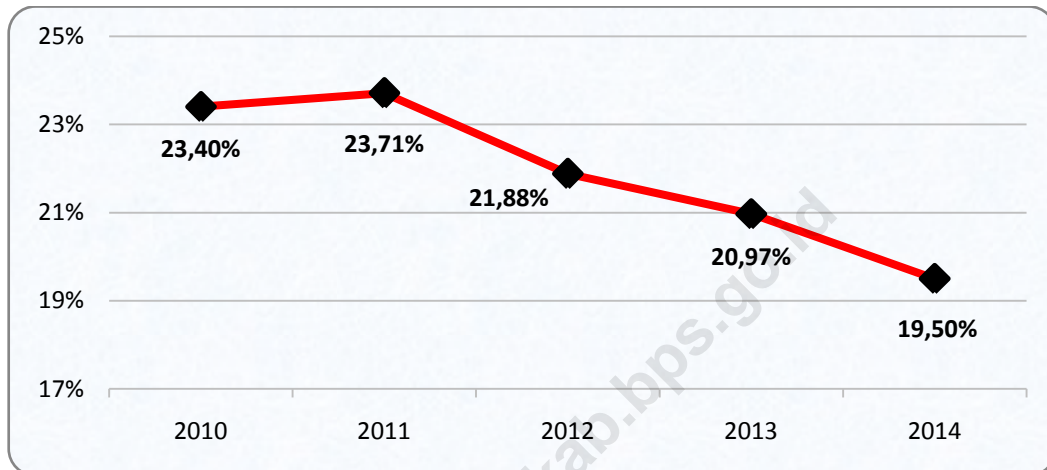


Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

Perubahan jumlah penduduk miskin pada periode tahun 2010-2014 berpengaruh juga terhadap persentase penduduk miskin. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang tercatat sebesar 23,40 persen pada tahun 2010, kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 23,71 persen. Setelah itu antara

tahun 2012-2014 turun hingga menjadi 19,50 persen dari jumlah penduduk se-Kabupaten Rembang (**Gambar 5.2**).

Gambar 5.2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang, 2010-2014



Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

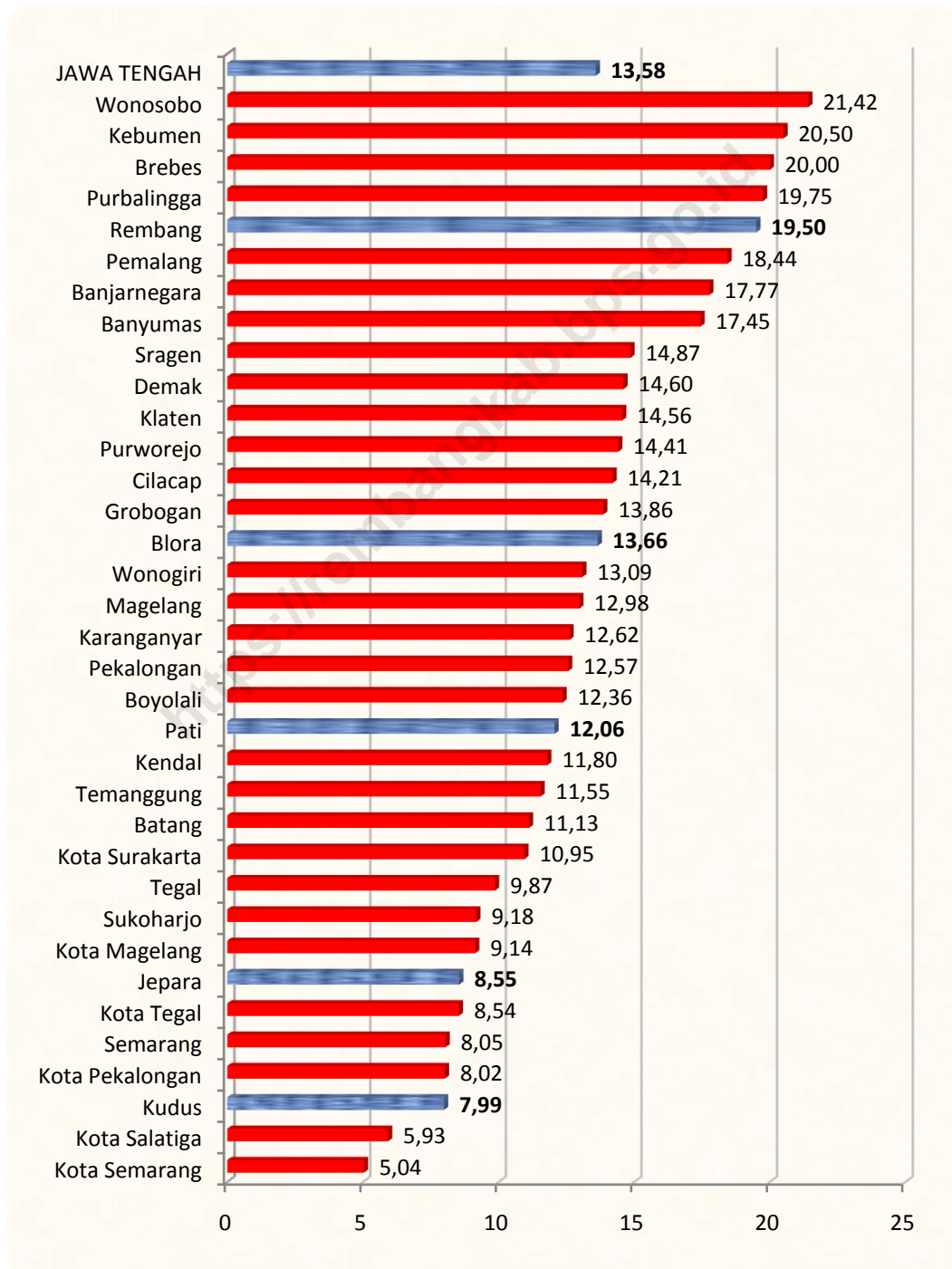
Bila dibandingkan menurut kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang (19,50 persen) pada tahun 2014 berada di peringkat 5 (lima) tertinggi dari 35 kabupaten/kota, setelah Kabupaten Wonosobo (21,42 persen), Kabupaten Kebumen (20,12 persen), Kabupaten Brebes (20,00 persen) dan Kabupaten Purbalingga (19,75 persen). Sedangkan untuk Propinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin sebesar 13,58 persen, mengalami penurunan dibandingkan 2013 (14,44 persen).

Pada **Gambar 5.3** juga terlihat bahwa dari 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah, terdapat 15 kabupaten/kota yang persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dari angka propinsi. Sedangkan kabupaten/kota yang terendah persentase penduduk miskinnya adalah Kota Semarang (5,04 persen), Kota Salatiga (5,93 persen) dan Kabupaten Kudus (7,99 persen).

Pada tahun 2014 terjadi perubahan pada peringkat tiga besar yang persentase penduduk miskinnya tertinggi bila dibandingkan tahun 2013. Kabupaten Rembang yang dulunya peringkat tiga menjadi rangking lima, sedangkan yang menjadi peringkat tiga pada tahun 2014 adalah Kabupaten Brebes. Perubahan juga terjadi pada peringkat tiga

besar yang persentase penduduk miskinnya terendah. Bila pada tahun 2013 Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan pada posisi satu, dua dan tiga terendah, pada tahun 2014 Kota Pekalongan tergeser ke posisi empat oleh Kabupaten Kudus.

Gambar 5.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, 2014



Sumber : Susenas 2014, BPS

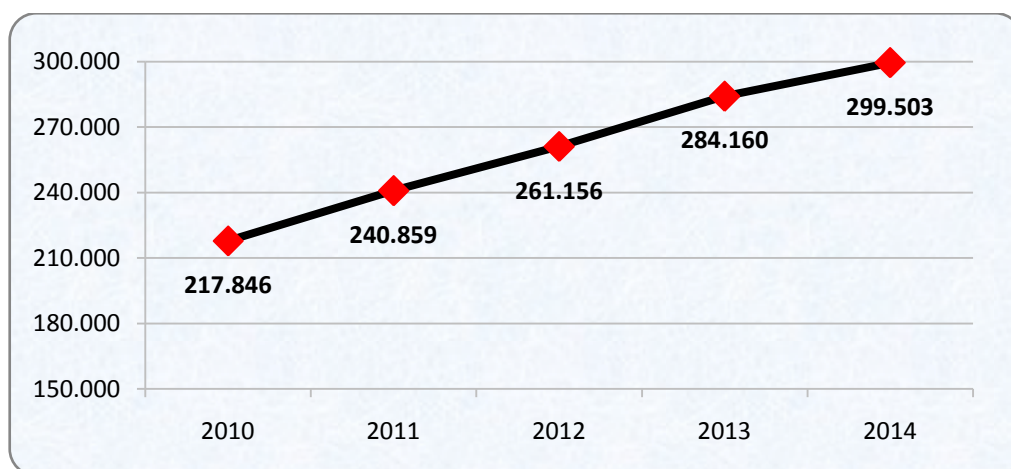
Di wilayah eks-Karesidenan Pati, Kabupaten Rembang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi (19,50 persen) dibanding kabupaten lainnya. Bahkan bila dilihat dari persentasenya, hanya Kabupaten Rembang yang persentase penduduk miskinnya lebih dari 15 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus (7,99 persen) merupakan yang terendah di antara 5 (lima) kabupaten yang berada di wilayah eks Karesidenan Pati. Kabupaten Jepara, Pati dan Blora memiliki persentase penduduk miskin berkisar antara 8-14 persen.

5.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Garis kemiskinan adalah batasan untuk mengetahui miskin atau tidaknya seseorang. Seseorang yang mempunyai pendapatan yang lebih kecil dari garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang miskin dan sebaliknya.

Perkembangan garis kemiskinan pada periode tahun 2010-2014 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2010-2014 garis kemiskinan Kabupaten Rembang meningkat sebesar 81.657 rupiah/kapita/bulan, yaitu dari 217.846 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2010 menjadi 299.503 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2014. (Gambar 5.4).

Gambar 5.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Rembang, 2010-2014 (Rp)



Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

Mencermati gambar di atas, ternyata garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena memang trend akan kebutuhan hidup manusia setiap saatnya berubah. Gambar di atas juga bisa diartikan bahwa besarnya konsumsi perkapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 maksimal sebesar 284.160,- dan pada tahun 2014 berubah menjadi 299.503,-.

5.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang

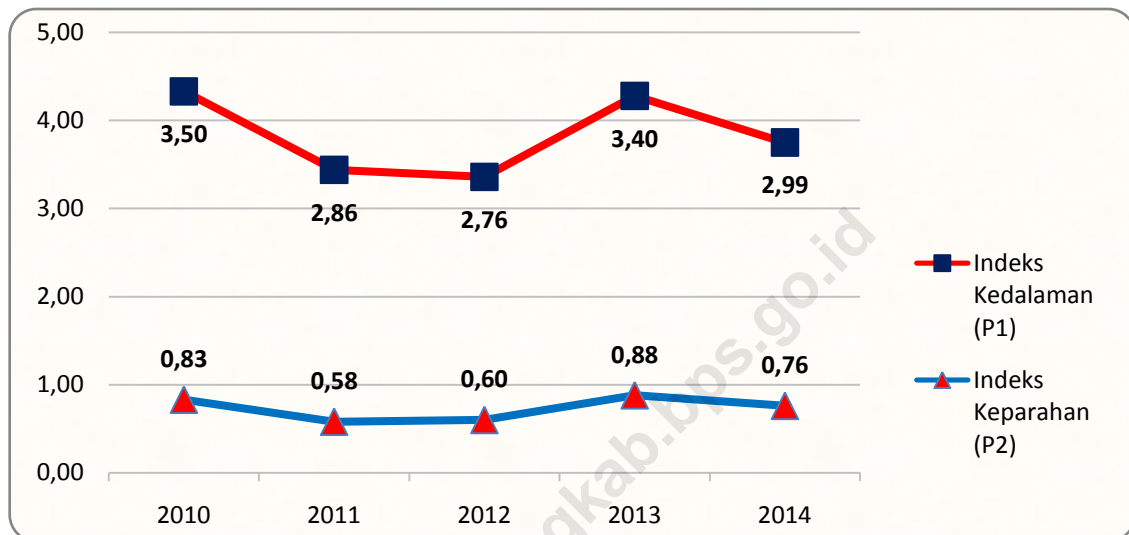
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan diukur dari indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap/P1*), sedangkan tingkat keparahan kemiskinan diukur dari indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity/P2*). Ukuran P1 menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilainya, maka penduduk miskin ini semakin menjauhi garis kemiskinan tersebut. Sedangkan ukuran P2 menunjukkan adanya penyebaran pengeluaran dari penduduk. Semakin tinggi nilai dari indeks ini, maka diantara penduduk miskin terjadi kesenjangan yang semakin melebar.

Pada periode tahun 2010-2012, indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun dari 3,50 menjadi 2,76 pada tahun 2012. Setelah meningkat pada tahun 2013 menjadi 3,40, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan pada tahun 2014 hingga menjadi 2,99. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang antara tahun 2010 hingga tahun 2012 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang berarti ada perbaikan pada perekonomian penduduk miskin. Setelah pada tahun 2013 mengalami penurunan tingkat perekonomian, yang ditunjukkan dengan kenaikan P1, pada tahun 2014 perekonomian penduduk Kabupaten Rembang kembali meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,41 poin, hingga

menjadi 2,99, yang berarti pada tahun 2014 rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang semakin mendekati garis kemiskinan.

Gambar 5.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Rembang, 2010-2014



Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode tahun 2010-2011 mengalami penurunan sebesar 0,25 poin, yaitu dari 0,83 menjadi 0,58. Tetapi pada periode tahun 2011-2013 terus mengalami kenaikan hingga menjadi menjadi 0,88, atau meningkat 0,30 poin. Naiknya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang semakin melebar. Pada tahun 2014, indeks keparahan kemiskinan (P2) kembali turun menjadi 0,76, yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang sedikit menyempit dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Dengan ukuran *Gini Ratio* yang menghasilkan angka 0,33, distribusi pendapatan di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan berdasarkan kriteria Bank Dunia, tercatat bahwa pendapatan 40 persen penduduk berpenghasilan rendah sebesar 20,87 persen. Hal ini berarti tingkat pendapatan antar golongan penduduk cukup merata.
2. Dengan ukuran *Gini Ratio* maupun kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan pada tahun 2014 sedikit lebih buruk dibandingkan tahun 2013.
3. Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan pada tahun 2014 tercatat sebesar 616.826 rupiah, meningkat bila dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 554.973 rupiah.
4. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk bahan makanan menurun pada tahun 2014 menjadi 53,44 persen dari sebelumnya 55,05 persen pada tahun 2013.
5. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada periode 2010-2014 cenderung menurun dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2011 sedikit mengalami kenaikan.
6. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang (19,50 persen) menempati peringkat kelima dari yang tertinggi, setelah Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes dan Purbalingga. Sedangkan di eks-Karesidenan Pati, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang paling tinggi di antara kabupaten lainnya.
7. Perkembangan garis/batas kemiskinan pada periode 2010-2014 di Kabupaten Rembang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

8. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang pada tahun 2014 menurun dibandingkan tahun 2013, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami hal yang sama, sedikit menurun dibandingkan tahun 2013, yang berarti ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Rembang kembali menyempit.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan penting yang harus ditangani lebih serius dan memerlukan kepedulian yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Rembang. Terutama bila ada kenaikan harga BBM, seperti yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014, meskipun sejak tahun 2011 jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang terus menurun.

Tetapi kenaikan harga BBM tersebut cukup berpengaruh pada kelompok penduduk berpenghasilan rendah, terutama yang terjadi pada tahun 2013. Hal demikian terlihat pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kelompok penduduk yang berpendapatan menengah ke atas, kenaikan harga BBM pada tahun 2013 dan 2014 tidak terlalu berpengaruh. Hal tersebut terlihat dari nilai *Gini Ratio* dan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang menunjukkan distribusi pendapatan cukup merata dan ketimpangan yang rendah.

Oleh karena itu, diperlukan program jangka pendek dan jangka panjang yang cerdas dari semua unsur pemerintahan yang ada. Selain itu, penduduk miskin yang paling terkena dampak dari kenaikan harga-harga juga perlu diikutsertakan dan diberdayakan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), 2009, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2009*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar 2014) Pedoman Pencacahan Kor*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar 2014) Pedoman Pencacahan Modul Konsumsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2014, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2012*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2014. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2013*. Semarang : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2014. *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2009-2013*. Semarang : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2015. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Rembang 2013*. Rembang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.

<http://bps.go.id>

<http://jateng.bps.go.id>

<http://www.kompasiana.com/mhoddonk/kenaikan-bbm-2014-persepsi-dampak-positif-negatif-dan-upaya-solutif>

<http://nasional.sindonews.com/read/953669/149/membedah-dampak-naik-turun-harga-bbm>

LAMPIRAN
TABEL -TABEL

<https://repositori.bps.go.id>

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2007-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2007	174,30	30,71	4,83	1,18	163.449
2008	154,70	27,21	5,48	1,43	172.010
2009	147,15	15,92	3,66	0,78	200.216
2010	138,50	23,40	3,50	0,83	217.846
2011	140,38	23,71	2,86	0,58	240.859
2012	132,40	21,88	2,76	0,60	261.156
2013	128,00	20,97	3,40	0,88	284.160
2014 ^{*)}	119,99	19,50	2,99	0,76	299.503

Sumber : Susenas 2007-2014, BPS

Keterangan : *) Tahun 2014 merupakan angka sementara

Tabel 2. Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Nilai Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Rembang, 2010-2014

Tahun	Gini Ratio	Kriteria Bank Dunia		
		40 % I	40 % II	20 % III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	0,19	28,47	40,35	31,18
2011	0,27	24,47	37,49	38,04
2012	0,33	20,84	33,01	46,15
2013	0,32	21,66	37,05	41,29
2014	0,33	20,87	35,53	43,60

Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

Tabel 3. Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Rembang, 2010-2014

Tahun	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Makanan		Non Makanan	
		Jumlah (Rp)	Persentase (%)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	307.613	177.762	57,79	129.851	42,21
2011	372.746	210.290	56,42	162.456	43,58
2012	472.521	241.811	51,17	230.710	48,83
2013	554.973	305.510	55,05	249.463	44,95
2014	616.826	329.610	53,44	287.216	46,56

Sumber : Susenas 2010-2014, BPS

Tabel 4. Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Keperluan Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Rembang, 2013

Jenis Pengeluaran			
Makanan	%	Non Makanan	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	9,31	Perumahan dan Fasilitas Rata	14,40
Umbi-umbian	0,13	Aneka Barang dan Jasa	18,84
Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	3,02	- Kesehatan	7,52
Daging	1,28	- Pendidikan	3,46
Telur dan Susu	2,06	- Lainnya	7,86
Sayur-sayuran	4,30	Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	2,82
Kacang-kacangan	1,86	Barang Tahan Lama	6,27
Buah-buahan	2,63	Pajak, Pungutan dan Asuransi	1,47
Minyak dan Lemak	1,88	Keperluan Pesta & Pesta/Kenduri	1,15
Bahan Minuman	1,43		
Bumbu-bumbuan	1,16		
Konsumsi Lainnya	0,94		
Makanan & Minuman Jadi	17,39		
Tembakau dan Sirih	7,66		
Jumlah	55,05	Jumlah	44,95
Rata-rata Pengeluaran	305.510	Rata-rata Pengeluaran	249.463

Sumber : Susenas 2013, BPS

Tabel 5. Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Keperluan Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Rembang, Tahun 2014

Jenis Pengeluaran			
Makanan	%	Non Makanan	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	8,56	Perumahan dan Fasilitas Ruta	13,60
Umbi-umbian	0,15	Aneka Barang dan Jasa	17,91
Ikan/Undang/Cumi/Kerang	3,12	- Kesehatan	4,00
Daging	1,29	- Pendidikan	3,10
Telur dan Susu	2,12	- Lainnya	10,81
Sayur-sayuran	3,52	Pakaian, Alas kaki & Tutup Kepala	2,98
Kacang-kacangan	1,77	Barang Tahan Lama	9,44
Buah-buahan	2,78	Pajak, Pungutan dan Asuransi	1,32
Minyak dan Lemak	1,79	Keperluan Pesta & Pesta/Kenduri	1,31
Bahan Minuman	1,28		
Bumbu-bumbuan	1,11		
Konsumsi Lainnya	0,94		
Makanan & Minuman Jadi	17,59		
Tembakau dan Sirih	7,43		
Jumlah	53,44	Jumlah	46,56
Rata-rata Pengeluaran	329.610	Rata-rata Pengeluaran	287.216

Sumber : Susenas 2014, BPS

Tabel 6. Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Makanan/Non Makanan Kabupaten Rembang, 2013

Kelompok Pendapatan (Rupiah/Bulan)	Persentase Penduduk Tengah Tahun	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kurang dari 100.000	0,00	0	0,00	0,00
100.000 – 149.999	0,00	0	0,00	0,00
150.000 – 199.999	3,64	179.677	65,78	34,22
200.000 – 299.999	21,05	258.510	65,30	34,70
300.000 – 499.999	32,76	387.071	64,64	35,36
500.000 – 749.999	25,63	612.338	61,72	38,28
750.000 – 999.999	7,60	854.226	58,19	41,81
1.000.000 dan lebih	9,32	1.559.612	33,75	66,25
Kab. Rembang 2013	608.903 ¹⁾	554.973	55,05	44,95
2012	603.582 ¹⁾	472.521	51,17	48,83
2011	598.122 ¹⁾	372.746	56,42	43,58
2010	592.492 ¹⁾	307.613	57,79	42,21

Sumber : Tahun 2010, diolah dari Susenas Juli

Tahun 2011-2013, diolah dari Susenas Gabungan Triwulan I-IV

¹⁾ Proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010)

Tabel 7. Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Makanan/Non Makanan Kabupaten Rembang, 2014

Kelompok Pendapatan (Rupiah/Bulan)	Persentase Penduduk Tengah Tahun *)	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000 – 149.999	0	0	0	0
150.000 – 199.999	1,53	188.845	67,54	32,46
200.000 – 299.999	18,64	258.884	63,18	36,82
300.000 – 499.999	34,85	391.373	62,76	37,24
500.000 – 749.999	23,15	624.844	64,03	35,97
750.000 – 999.999	10,06	858.184	59,97	40,03
1.000.000 dan lebih	11,78	1.684.100	34,63	65,37
Kab. Rembang 2014	614.169	616.826	53,44	46,56

Sumber : Tahun 2014 diolah dari Susenas Gabungan Triwulan I-III

*) Proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Pemuda Km. 1 Rembang, 59218

Telp. dan Faks. (0295) 691040

Situs web : <http://rembangkab.bps.go.id>

Email : bps3317@bps.go.id